



**ALTERNATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA KAWAH IJEN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*Alternative Strategies for Community Empowerment in Development of Ijen Crater
Tourist Resort by Government of Banyuwangi Regency*

SKRIPSI

Oleh

Ira Puspita Sandy

NIM 110910201037

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**ALTERNATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA KAWAH IJEN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Ira Puspita Sandy

NIM 110910201037

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Sandy Liswanto dan Ibu Uliya Kholidah yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti bagi saya.
2. Kakak saya Ayu Prastika Sandy, Farid Habibi serta kedua adik saya Diah Pitaloka Sandy dan Farrell Pacifico Sandy yang senantiasa memberikan dukungan.
3. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tangis dan tawamu hanya berlebihan saat kau lupa bahwa hidup cumalah akting dari naskah semesta yang belum kau baca dari Sang Maha Sutradara.”

(Sujiwo Tedjo)¹

“Never give up. Today is hard, tommorow will be worse, but the day after tommorow will be sunshine.”

(Jack Ma)²

¹ www.goodreads.com

² www.brainyquote.com

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Puspita Sandy

NIM : 110910201037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2016

Yang menyatakan,

Ira Puspita Sandy
NIM 110910201037

SKRIPSI

**ALTERNATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA KAWAH IJEN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*Alternative Strategies for Community Empowerment in Development of Ijen Crater
Tourist Resort by Government of Banyuwangi Regency*

Oleh

Ira Puspita Sandy

NIM 110910201037

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati,MM

Dosen Pembimbing Anggota : HermantoRohman,S.Sos.,MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 15 Maret 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 195307311980022001

Anggota Penguji

1. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si (.....)
NIP 195805101987022001
2. Drs. Anwar, M.Si (.....)
NIP 196306061988021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof.Dr. Hary Yuswandi, MA
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Ira Puspita Sandy, 110910201037; 2016; 126 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mengambil topik ini karena kawasan Kawah Ijen yang berada di Desa Tamansari memiliki potensi wisata serta sarana prasarana yang mendukung sehingga menjadi kebutuhan mengembangkan kawasan desa wisata agar masyarakat dapat diberdayakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, maju dan mandiri.

Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dijalankan melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2015 belum mampu memberi kemajuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari. Fakta menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat masih belum mencukupi untuk mengelola potensi yang ada secara maksimal dan program-program yang ada masih belum dapat melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa Tamansari secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena belum adanya strategi yang mencakup pemanfaatan potensi-potensi dan sistem jual dari hasil ketrampilan masyarakat sehingga perlu adanya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Kurangnya sosialisasi program wisata yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangkap peluang wisata.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan analisis SWOT. Lokasi penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Bappeda, Desa Tamansari, BKSDA Wilayah V Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang dianggap mempunyai informasi dan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari menggunakan matriks SWOT dihasilkan empat kemungkinan strategi yaitu SO, WO, ST dan WT. Keempat strategi kemudian dibandingkan dengan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Hasil perbandingan diperoleh alternatif strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen yaitu Mengenalkan masyarakat dengan keterampilan membatik dan kuliner, Menjadikan paket agrowisata dan Bekersama dengan Jasa *Travel* yang dikelola Masyarakat Lokal, Melestarikan Budaya Banyuwangi Melalui Pagelaran Tari Tradisional Gandrung, Mendorong dan mendampingi tumbuh-kembangnya industri kreatif dan pemasaran hasil industri kreatif di Desa Tamansari dengan meningkatkan UMKM masyarakat, Meningkatkan pemanfaatan produk lokal yaitu dengan Peningkatan nilai jual kopi yang dikembangkan dengan fermentasi hewan luwak.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM dan Bapak Hermanto Rohman, S.Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Bapak Suji, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
7. Seluruh informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data;

8. Felix David yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat saya, Cindara, Fudzlah, Anita, Istiar, Iif, Risa, Betty, Ekabella, Silvy, Beni, Vistario, Agil terimakasih telah memberikan motivasi, semangat serta kebersamaannya selama ini dan seluruh teman-teman Administrasi Negara 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat dan kebersamaannya semasa kuliah;
10. Teman-teman kos2B16, Faiza, Yulinta, Rizki, Lastr, Tria, Sita yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Mulyono, Pak Asep, Pak Heru terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan semasa kuliah;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal. Kritik dan saran dari berbagai pihak diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 15 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkembangan Paradigma Administrasi Negara.....	12
2.1.1 Perkembangan Administrasi Negara Di Indonesia	13
2.2 <i>New Public Management</i>.....	14
2.3 Manajemen Strategi.....	16
2.3.1 Perencanaan Strategi.....	18
2.3.2 Strategi.....	19
2.3.3 Instrumen Perumusan Strategi.....	19
2.4 Pemerintah Daerah	23
2.5 Kepariwisataaan	26
2.5.1 Pengertian Pariwisata.....	26
2.5.2 Kawasan Wisata.....	28

2.5.3 Obyek dan Daya Tarik Wisata.....	29
2.5.4 Sarana dan Prasarana kepariwisataan.....	30
2.5.5 Pengelolaan Pariwisata.....	31
2.5.6 Pengembangan Pariwisata.....	34
2.5.7 Pemangku Kepentingan Pariwisata.....	35
2.6 Pemberdayaan Masyarakat.....	38
2.6.1 Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	41
2.7 Kerangka Berpikir Penelitian.....	44
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Fokus Penelitian.....	47
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
3.4 Data dan Sumber data.....	47
3.5 Teknik Pemilihan Informan.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	51
3.8 Teknik Analisis Data.....	52
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi.....	55
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi.....	55
4.1.3 Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi.....	57
4.1.4 Taman Wisata Alam Kawah Ijen.....	62
4.1.5 Potensi Wisata Desa Tamansari.....	67
4.2 Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen.....	71
4.2.1 Aksesibilitas dan Fasilitas Kepariwisataaan.....	72
4.2.2 Prasarana wisata di Desa Tamansari.....	75
4.2.3 Atraksi dan Daya Tarik Wisata.....	76
4.2.4 Keterlibatan Masyarakat lokal.....	77
4.3 Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen.....	78
4.3.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM.....	81
4.3.2 Promosi Desa Tamansari.....	83
4.3.3 Kerjasama Dengan Stakeholder dan Swasta.....	88

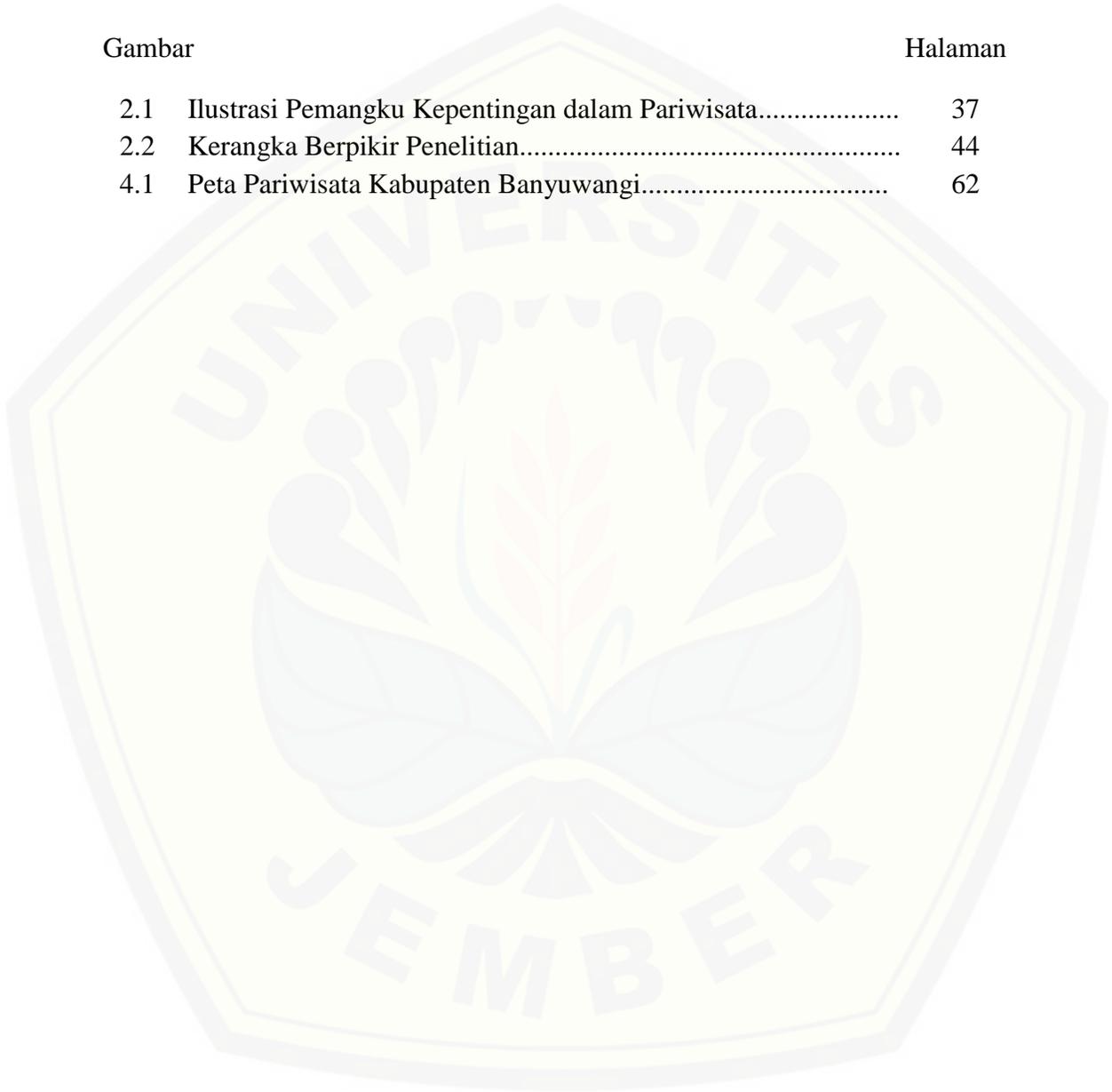
4.4 Keterlibatan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan	
Wisata Kawah Ijen.....	90
4.4.1 Kelompok Sadar Wisata.....	91
4.4.2 Usaha Pariwisata.....	94
4.5 Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pada	
Pengembangan Pariwisata.....	103
4.6 Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan	
Kawasan Wisata Kawah Ijen Melalui SWOT.....	107
4.6.1 Analisis Faktor Internal.....	108
4.6.2 Analisis Faktor Eksternal.....	113
4.7 Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada	
Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen.....	119
BAB 5. PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata DiKabupaten Banyuwangi Tahun 2014.....	5
1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kawah Ijen Tahun 2011-2015...	6
3.1 Matriks SWOT.....	53
4.1 Bentuk Kerja Sama BKSDA Wilayah V Banyuwangi Dengan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengelolaan Kawah Ijen.....	67
4.2 Potensi Wisata Desa Tamansari.....	70
4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kawah Ijen Tahun 2010-2015...	73
4.4 Strategi dan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.....	106
4.5 Matrix SWOT Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen.....	117
4.6 Perbandingan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Alternatif Strategi.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Ilustrasi Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata.....	37
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	44
4.1 Peta Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Strategi dan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat keterangan selesai melakukan penelitian
- Lampiran 5 Surat ijin melakukan penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 6 Surat rekomendasi untuk melakukan penelitian dari Bakesbang Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 7 Surat ijin melakukan penelitian dari Kantor Kecamatan Licin
- Lampiran 8 Data Pengunjung Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015
- Lampiran 9 Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015
- Lampiran 10 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat merupakan salah satu target pembangunan bangsa yang sangat sentral. Keberhasilan suatu bangsa menapaki peradaban selalu dilihat dari tingkat pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, situasi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, dengan tingkat kesempatan kerja yang menurun serta adanya kecenderungan angka kemiskinan dan pengangguran, sangat diperlukan suatu tindakan nyata untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah strategi pemberdayaan masyarakat. Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat maka strategi pemberdayaan masyarakat yang di terapkan harus menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Para pelaku pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan membina kebersamaan sehingga dampaknya bukan hanya pada pemberdayaan posisi masyarakat lapisan bawah namun lebih jauh juga pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan. Menurut Coulter (2002:7) dalam Kuncoro (2005:12) strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Adimihardja (1999) dalam Bambang Sunaryo (2013:215) diartikan sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Dari pengertian tersebut strategi pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang sedang tidak berdaya agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat. Strategi ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, maju dan mandiri.

Usaha pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Salah Wahab (2003:5) menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Secara normatif, Janianton Damanik (2013:2) mengatakan bahwa pariwisata dinyatakan sebagai “obat mujarab” yang mampu menyulap belantara kemiskinan menjadi kemakmuran material. Pandangan ini dapat dilacak dari rumusan visi-misi pembangunan pariwisata. Di dalam rumusan itu pariwisata dinobatkan sebagai sektor unggulan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepariwisataan sebagai salah satu kegiatan pembangunan yang diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa:

“kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”.

Diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara makro cukup signifikan. Laporan berbagai kajian ahli dalam Janianton Damanik (2013:03) menyimpulkan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam bentuk perluasan peluang kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan spasial. Pariwisata dinobatkan sebagai motor pembangunan karena diakui mampu memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Landasan UU No. 23 Tahun 2014 memberi konsekuensi pada daerah untuk dapat menggali dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki sebagai penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Dengan pemberian kewenangan yang luas, pemerintah daerah dituntut harus benar-benar berpikiran jauh kedepan untuk dapat mengembangkan semua potensi sumber daya alam yang pada gilirannya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada hal inilah yang kemudian mendorong bagi pemerintah memajukan pariwisata dengan mengembangkan kawasan wisata. Pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu upaya pengembangan yang terencana secara menyeluruh untuk memberdayakan masyarakat serta memacu untuk mengembangkan potensi desa yang mengarah pada peningkatan produktivitas masyarakat agar lebih mandiri.

Kabupaten Banyuwangi telah berusaha mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya memberdayakan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan rencana strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 (lihat lampiran 1). Renstra merupakan bentuk strategi dan uraian secara garis besar tentang kebijakan makro pembangunan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berupa pelaksanaan program, kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010–2015. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat juga bagian dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Strategi dirumuskan berdasarkan permasalahan dan dilaksanakan melalui program-program yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan permasalahan, maka strategi yang ditetapkan antara lain Pengembangan kerjasama dengan semua *stakeholder*, Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku wisata, Menciptakan *Branch Image* positif bagi pariwisata. Termasuk pada permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata, kemampuan bahasa dan ketrampilan masyarakat yang

belum maksimal, belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata serta belum maksimalnya SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata yang dapat mengakibatkan tergesernya peran masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan permasalahan, program tersebut mencakup diantaranya peningkatan kemampuan pelaku-pelaku wisata, pengembangan ketrampilan sumber daya manusia lokal, peningkatan kualitas pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menyadari potensi besar disektor pariwisatanya, baik dari potensi alamnya serta keanekaragaman dan kekayaan budaya. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, berbagai penghargaan di bidang pariwisata telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diantaranya adalah penghargaan *Travel Club Tourism Award* kategori *The Most Improved* pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 meraih penghargaan *Travel Club Tourism Award* kategori *The Most Creative and Investment Award* kategori promosi investasi terbaik tingkat Kabupaten di Jawa Timur serta pada tahun 2016 berhasil meraih penghargaan dari badan urusan pariwisata **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** atau **UNWTO** di ajang 12th UNWTO Awards Forum yang digelar di Spanyol dengan menyabet *UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism* untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola. Prestasi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha keras untuk membangun sebuah *brand image* bahwa Banyuwangi sangat layak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata baik untuk pengunjung domestik maupun asing dan tujuan utama tempat investasi penanaman modal. Dari banyaknya obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi, berikut data jumlah kunjungan wisatawan obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No.	Nama obyek wisata	Wisnus	Wisman
1.	Desa Wisata Using	54.199	-
2.	Ekowisata bedul	35.362	-
3.	Kawah ijen	80.786	19.982
4.	Pantai Grajagan	-	471
5.	Pantai Watudodol	38.242	-
6.	Pulau Merah	34.931	-
7.	Pemandian Alam Indah Lestari(AIL)	336.431	5.048
8.	Pemandian Atlanta	33.266	-
9.	Pemandian Mirah Fantasi	61.128	-
10.	Pemandian Gumuk Kantong Indah	52.345	56
11.	Pemandian pancoran	7.798	-
12.	Pemandian Taman Suruh	107.359	-
13.	Pemandian Mendut Hijau	83.427	-
14.	Rowo Bayu	9.386	-
15.	Situs Umpak Songo	2.700	-
16.	Sukamde	40.139	-
17.	TN.Alas Purwo	49.749	2.144
18.	Umbul bening	130.577	2.980
19.	Umbul pule	76.356	-
20.	X Badeng Adventure	66.973	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi,2014

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari berbagai macam wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Kawah Ijen memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan pariwisata lainnya di Kabupaten Banyuwangi terutama ketertarikan wisatawan mancanegara yang sangat tinggi dibandingkan obyek wisata lainnya. Oleh sebab itu dengan memanfaatkan potensi kawah Ijen dapat dilakukan pengembangan kawasan wisata yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Wisata Kawah Ijen adalah obyek wisata alam yang terletak dalam wilayah Cagar Alam Taman wisata Ijen di Kabupaten Banyuwangi. Wisata Kawah Ijen dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur Seksi Konservasi Wilayah V Banyuwangi dan didukung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta Perhutani. Kawah Ijen merupakan fokus Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I sebagai kawasan pariwisata segitiga berlian (*diamond triangle*) di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Kawah Ijen memiliki daya tarik wisata berupa

kawah danau yang mengandung belerang dengan eksotika panorama api biru (*bluefire*) yang keluar dari kawah belerang, keunikan penambang belerang tradisional, keanekaragaman flora dan fauna, serta kawasan yang mendukung untuk dijadikan wisata. Keunikan dan daya tarik wisata Kawah Ijen tidak dimiliki obyek wisata lainnya di Kabupaten Banyuwangi sehingga dari keunikan dan daya tarik wisata tersebut mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Adapun data kunjungan wisatawan kawah ijen dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kawah Ijen Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Pengunjung
2011	16.428
2012	Status siaga
2013	25.894
2014	100.768
2015	76.480

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ,2015

Berdasarkan dari tabel 1.2 bahwa pada tahun 2011 jumlah pengunjung sebesar 16.428 orang. Namun tahun 2012 aktifitas kawah ijen meningkat dan status dinaikkan dari waspada menuju siaga sampai waktu tertentu sehingga tidak ada kunjungan wisatawan. Tahun 2013 pengunjung mengalami peningkatan sebesar 58,17% yaitu sebanyak 25.894 orang. Pada tahun 2014 pengunjung kembali mengalami kenaikan sebesar 298.16% dari tahun sebelumnya sebanyak 100.768 orang. Tahun 2015 sampai dengan bulan juli jumlah pengunjung sudah tercatat 76.480 orang sehingga dapat diprediksikan bahwa jumlah kunjungan tahun 2015 lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kawah Ijen sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga keberadaan aset wisata Kawah Ijen mendapat respon positif wisatawan dalam bentuk kunjungan wisatanya. Salah satu tolak ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang secara

langsung akan diikuti oleh pengembangan kawasan wisata serta sarana dan prasarana pendukung wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Desa Tamansari merupakan pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen. Bila dibandingkan dengan 7 (tujuh) desa lain yang ada di Kecamatan Licin, Desa Tamansari merupakan desa yang paling dekat yaitu sekitar ± 16 km dari wisata Kawah Ijen. Desa ini terletak di jalur pendakian Kawah Ijen yang letaknya berada di desa akhir pendakian, setiap hari jalan desa ini tidak pernah sepi dari aktifitas pendakian wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa Tamansari mempunyai potensi wisata yang menarik diantaranya pemandangan alam, kesenian tradisional, budaya, peninggalan bersejarah, penambang tradisional serta fasilitas yang tersedia seperti hotel, villa, restoran, *rest area* serta usaha kepariwisataan yang dikelola masyarakat seperti jasa angkutan wisata, jasa pemandu wisata (*tour guide*), kerajinan tangan dan *homestay*. Selain itu, juga terkenal sebagai penghasil kopi robusta dengan kualitas yang baik, lingkungan pedesaan yang sejuk dengan hamparan pegunungan yang tinggi sangat cocok untuk melihat matahari terbit serta melihat pemandangan selat Bali dan kota Banyuwangi. Menurut Oka A. Yoeti (1996:165) bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata tergantung pada aspek 3A yaitu *attraction* (atraksi), *accessibility* (mudah dicapai), *aminties* (fasilitas). Maka dari itu dari potensi wisata yang ada di Desa Tamansari menjadi dasar kuat adanya kebutuhan mengembangkan kawasan yang dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata. Dari pemanfaatan potensi desa Tamansari dalam pengembangan kawasan wisata akan dapat menarik wisatawan sebagai paket wisatawan untuk berwisata sebelum maupun sesudah dari wisata Kawah Ijen serta berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri untuk menjadi desa wisata yang produktif.

Dari pelaksanaan program yang ada dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun periode ini masih belum mampu memberi kemajuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah

Ijen di Desa Tamansari. Melalui hasil pengamatan, upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tamansari dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan bahasa inggris, pelatihan komputer, penyuluhan kewirausahaan dan pendampingan umkm atau industri kreatif dari masyarakat terutama dalam mengembangkan usaha pariwisata tidak dilakukan secara berkelanjutan, semua kegiatan tersebut hanya dilakukan pada tahun 2014 sehingga kemampuan masyarakat masih belum mencukupi untuk mengelola potensi yang ada secara maksimal. Belum adanya strategi dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang mencakup pemanfaatan potensi-potensi agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tamansari yang berdampak kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum dapat memanfaatkan dan mengelola hasil alam seperti kopi, padahal jika kopi bisa dikelola akan menambah nilai jual. Kendala berikutnya berkaitan dengan hasil kreatifitas masyarakat seperti hasil kerajinan belerang dan kerajinan dari pelepah pisang yang masih perlu dilakukan pembinaan. Pembelian belerang masih dilakukan ditempat penimbangan belerang yang ada di Desa Tamansari sedangkan tempat pembelian kerajinan lainnya masih sulit ditemukan, hal ini karena pemerintah daerah belum menetapkan strategi tentang sistem jual dari hasil ketrampilan masyarakat. Masih sedikitnya usaha kuliner atau warung yang tersedia padahal warung merupakan bagian dari fasilitas pariwisata dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pertunjukan seni tradisional sebagai atraksi wisata pelestarian budaya oleh masyarakat desa Tamansari yang belum di tampilkan secara rutin, apabila pertunjukan seni tersebut ditampilkan secara rutin akan menambah penghasilan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi program yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangkap peluang wisata. Dilapangan masyarakat hanya diberi pelatihan secara teori saja, pelatihan mengenai pengelolaan pariwisata berbasis komunitas tidak pernah mereka terima. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal sangatlah penting. Suatu program

dikatakan sudah melibatkan masyarakat ketika masyarakat sudah diajak melaksanakan suatu program tertentu. Suatu program dikatakan partisipatif apabila masyarakat terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil.

Dari permasalahan diatas, menunjukan masih lemahnya strategi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat di Desa Tamansari. Upaya memberdayakan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata dengan berbasis komunitas belum sesuai yang diharapkan. Permasalahan tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian, diperlukan strategi yang efektif guna memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki dan mempertimbangkan pengaruh eksternalnya. Atas dasar inilah perlu adanya strategi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari melalui analisis SWOT. Dari analisis SWOT dihasilkan strategi SO,WO, ST dan WT. Keempat strategi kemudian dibandingkan dengan rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Hasil perbandingan akan diperoleh alternatif strategi yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Alternatif Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Pengembangan Kawasan Wisata Kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting untuk dirumuskan, karena hal ini dapat memberikan sebuah arahan untuk menjawab hipotesis yang dibuat. Seperti yang tertulis dalam buku pedoman penulisan karya Ilmiah Universitas Jember (2011:20) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis sementara dari asumsi. Dari definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti seharusnya memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:21) manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia Akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan yang bermanfaat bagi instansi-instansi yang terkait dalam mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pariwisata yang lebih baik.
- c. Penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah. Selain itu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian landasan teori atau konsepsi dasar merupakan salah satu alat pedoman yang penting dalam membantu proses penelitian dan membantu memberi landasan pokok kerangka berpikir kepada peneliti dalam membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2008:81), “landasan teori ini perlu ditegakkan agar proses penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).” Sejalan dengan itu Singarimbun dan Effendi (1995:33) menjelaskan bahwa, “konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.” Keberadaan dari konsep dasar ini akan memberikan gambaran awal mengenai alur penelitian yang kemudian akan dijadikan analisis selanjutnya. Konsep dasar teori akan memudahkan peneliti dalam menghubungkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sedang berkembang dan memberikan suatu gambaran awal mengenai langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan secara teoritis dalam penelitian ini yaitu Perkembangan paradigma administrasi Negara, *New Public Management*, Manajemen Strategi, Pemerintah Daerah, Kepariwisataaan, Pemberdayaan Masyarakat. Peneliti dalam menganalisa masalah penelitian ini berpedoman pada konsep-konsep utama tersebut sebagai landasan pemikiran teoritis. Konsep- konsep tersebut akan dijabarkan berdasarkan kajian dan teori yang telah ada.

2.1 Perkembangan Paradigma Administrasi Negara

Administrasi negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, hal itu akan timbul di masyarakat yang terorganisir. Jika di ikuti rumusan-rumusan administrasi negara, maka akan di peroleh berbagai definisi. Menurut Nicolas Henry yang dikutip oleh Thoha (2008:18) “terdapat krisis definisi dalam administrasi negara. Itulah sebabnya ia menyarankan untuk dipahami lewat paradigma. Lewat paradigma ini akan diketahui ciri-ciri administrasi negara. Tiap fase dari paradigma mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan *locus* dan *focusnya*. *Locus* menunjukkan dimana bidang studi tersebut dan *focus* menunjuk pada sasaran spesialisasi dari bidang studi”. Berdasarkan *locus* dan *focus* suatu disiplin ilmu Henry dalam (Thoha,2008:18) membagi paradigma administrasi negara menjadi lima yaitu.

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Pada tahun 1900 Frank J.Goodnow (penganut Wilsonia) mengatakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijaksanaan atau perumusan pernyataan keinginan negara, sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Paradigma ini menekankan pada locus administrasi negara yang dipusatkan pada birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini pusat perhatiannya pada focus administrasi negara. W.F.Willoughby mengemukakan adanya prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun. Gulick dan Uwick mengajukan tujuh prinsip administrasi yang dikenal dengan PODSCORB(*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

3. Paradigma 3: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi Negara kembali pada induk dispilannya yaitu ilmu politik, dan locusnya adalah birokrasi pemerintah tetapi fokusnya semakin berkurang.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini ilmu administrasi adalah studi gabungan teori organisasi dan ilmu management. Pada tahun 1960 muncul “Pengembangan Organisasi” sebagai bagian dari ilmu administrasi. Tetapi kemudian muncul masalah baru yaitu tentang garis yang memisahkan antara “*Public*” administrasi dengan “*Private*” administrasi, pada paradigma ini masih belum dapat mengatasi locus administrasi negara.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970)

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi negara yang baru dimana focus administrasi negara adalah teori organisasi dan ilmu management dan locusnya adalah kepentingan publik dan masalah-masalah publik.

2.1.1 Perkembangan Ilmu Administrasi Negara Di Indonesia

Secara teoritis, menurut Thoha (2008:61) perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia tidak ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan negara maju lainnya. Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang berlangsung di AS dengan mudah ditransfer menjadi perubahan paradigma di Indonesia. Perubahan *reinventing government* di AS dengan mudah pula dikembangkan di administrasi pemerintahan. Demikian pula perubahan paradigma dari *government* ke *governance* yang dikenal oleh UNDP dikopi dengan mudah menjadi program pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Banyak tulisan dan program pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan untuk meramaikan perkembangan dan perubahan paradigma di dalam manajemen pemerintahan dan ilmu administrasi negara.

Di Indonesia, ilmu administrasi negara merupakan kumpulan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa, dan yang jauh dari harapan rakyat. Kumpulan sketsa itu tidak berkendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan –penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut.

Administrasi negara sengaja dibuat tidak baik dan kacau agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak diketahui dan dikontrol oleh rakyat.

2.2 *New Public Management* (NPM)

Dewasa ini, organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreatifitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep *New Public Management*.

Tema pokok dalam *New Public Management* ini antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-intansi pemerintah dengan pelanggannya dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (*market place*). Di dalam konsep *New Public Management* semua pimpinan (*manager*) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.

Kunci *New Public Management* adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Christopher Hood dari London School of Economics (1995) dalam Miftah Thoha (2008:75) mengatakan bahwa *New Public Management* mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitimasi birokrasi publik untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi dipraktikan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah. Untuk lebih mewujudkan

konsep *New Public Management* dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menentukan alternatif cara-cara pelayan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan (Miftah Thoha, 2008:75).

Donald Kettl (2000) dalam Miftah Thoha (2008:75-76) menyebutkan dengan "*the global public management reform*" yang memfokuskan pada enam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil.
2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa menggantikan mekanisme tradisional "komando-komando" yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat.
3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga.
4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.
5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan yang sesungguhnya.

6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output dan input) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur.

New public management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik dan birokrasi modern.

2.3 Manajemen Strategi

Manajemen strategi sebagai suatu proses meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategi, dan evaluasi kinerja menurut Pearce & Robbins (2003:11-16) dalam Kuncoro (2005:13) memperlihatkan tahapan proses manajemen strategi, yaitu:

- a. Analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi
- b. Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- c. Implementasi strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
- d. Evaluasi strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

Sedangkan menurut Fred R. David (2010 : 06), proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi – strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komit pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama kurun waktu yang lama. Perumusan

strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen(2003: 12) perumusan strategi adalah pengembangan rencana panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang ingi dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi- strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Sedangkan menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2003:17) implemtasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijaksanaan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau system manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Sebagai perencanaan operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya.

c. Evaluasi atau Penilaian Strategi

Evaluasi atau Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Manajer harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan data karena berbagai faktor eksternal dan internal terus menerus berubah. 3 aktivitas paling mendasar dari penilaian strategi adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
2. Pengukuran kinerja.

3. Pengambilan langkah korektif.

Sedangkan menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2003:19) evaluasi adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhannya untuk dimulai kembali.

2.3.1 Perencanaan Strategi

Menurut Texas Workforce Commission (2005:09) perencanaan strategi atau *strategic planning* terdiri dari kata yaitu : perencanaan (*planning*) serta strategis (*strategic*). Perencanaan menetapkan arah untuk sesuatu. Biasanya, kita mulai dengan hasil yang diinginkan dan bekerja mundur untuk mengidentifikasi apa yang akan menghasilkan hasil tersebut dan strategis diartikan metode untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan mendasar yang memandu mereka ke visi mengembangkan masa depan. Sedangkan Bryson (2004:07) menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah upaya kuat untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan membimbing seperti apa sebuah organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dilakukannya, dan mengapa melakukannya.

Jadi, pada intinya perencanaan strategi merupakan suatu upaya yang akan mengarahkan organisasi pada pencapaian-pencapaian strategis sesuai visi organisasi pada masa sekarang maupun masa depan. Menurut Bryson (2004:08) adapun prinsip-prinsip perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu.
2. Perencanaan strategis lebih menekankan penilaian terhadap lingkungan di dalam dan diluar organisasi.
3. Perencanaan strategis tidak menafikkan peran stakeholders dalam memajukan organisasi.
4. Perencanaan strategis menerapkan sekali prioritas dalam beberapa masalah yang dihadapi.
5. Perencanaan strategis selalu menganalisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, threath*).
6. Visi dan misi organisasi tidak statis, dalam artian ia bisa berubah manakala sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman.

2.3.2 Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani, *strategeia* (*stratus* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Chandler (1962) dalam Rangkuti (1997:3) merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang.

Willian Stanton dalam Amirullah dan Sri Budi (2002:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu strategi yang baik tidak akan berhasil apabila tidak diikuti dengan kebijaksanaan dan taktik yang tepat. Menurut Coulter (2002:7) dalam Kuncoro (2005:12) strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan. Dengan demikian beberapa ciri strategi yang utama adalah:

1. *Goal-directed actions*, yaitu aktivitas yang menunjukkan apa yang diinginkan dan bagaimana mengimplementasikanya;
2. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan.

2.3.3 Instrumen Perumusan Strategi

1. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2004 : 18) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strenghts*) dan Kelemahan (*weakness*) (Rangkuti, 2004:19).

a. Kekuatan

Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan – keunggulan lain yang membedakan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Kekuatan diambil dari internal perusahaan.

b. Kelemahan

Kelemahan adalah suatu keterbatasan atau kekurangan di dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang dapat menghambat kinerja dari suatu perusahaan. Kelemahan diambil dari internal perusahaan.

c. Peluang

Peluang adalah suatu kondisi diluar lingkungan perusahaan yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

d. Ancaman

Ancaman adalah suatu kondisi dimana keadaan di luarlingkungan perusahaan dapat menjadi penghalang atau pengganggu yang menghambat kinerja perusahaan.

Analisis SWOT merupakan metode efektif yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk menciptakan visi mencapai strategi pembangunan. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah Matriks SWOT. Matriks ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kekuatan dan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dapat disesuaikan dengan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapinya.

e. Analisis EFE

Menurut Fred R. David (2010: 158) menyatakan bahwa Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, social, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif.

f. Analisis IFE

Menurut Fred R. David (2010:229 -230) menyatakan bahwa Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) memungkinkan para penyusun strategi meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan diantara area tersebut.

g. Analisis CPM

Menurut Fred R. David (2010:160-161) menyatakan bahwa Matriks Profil Kompetitif (CPM) mengidentifikasi pesaing -pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Peringkat di dalam matriks CPM mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana 4 = sangat kuat, 3= kuat, 2= lemah, 1 = sangat lemah. Faktor -faktor keberhasilan penting dalam matriks CPM lebih luas, karena tidak mencakup data spesifik atau aktual dan mungkin bahkan berfokus pada isu-isu internal. Pemberian peringkat dan skor bobot total perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel.

h. Analisis TWOS

Menurut Fred R. David (2010: 327) menyatakan bahwa Matriks TWOS (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi :

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi dimana kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal.
 - b. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang, peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut.
 - c. Strategi ST (*Strength-Threat*) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan eksternal.
 - d. Strategi WT (*Weakness-Threat*) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Dalam kenyataannya, perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, pensiutan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.
- i. Analisis IE (Internal – Eksternal)

Menurut Fred R. David (2010:344) menyatakan bahwa matriks Internal - Eksternal memosisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan Sembilan sel. Matriks IE didasarkan pada 2 dimensi kunci : skor bobot IFE total pada sumbu x dan skor bobot EFE total pada sumbu y. Pada sumbu x dari matriks IE,

skor bobot IFE total 1,0 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah; skor 2,0 sampai 2,99 menunjukkan posisi internal yang dianggap sedang; dan skor 3,0 sampai 4,0 menunjukkan posisi internal yang kuat.

j. Analisis Strategi Besar (Grand Strategy)

Menurut Fred R. David (2010:47-48) menyatakan bahwa matriks Grand Strategy adalah sebuah alat yang digunakan untuk merumuskan strategi alternative. Matriks Grand didasarkan pada 2 dimensi evaluatif yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar (industry).

k. Analisis Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM)

Menurut Fred R.David (2010:350-351) menyatakan bahwa Matriks QSPM adalah alat analisis yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif, berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya.

2.4 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2).

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Masing-masing pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan secara vertikal kepada daerah otonom. Dengan demikian, akan memunculkan bagaimana fungsi manajemennya atau mengurusnya. Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 bermakna sebagai

“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, semua kewenangan yang diluar dari kewenangan pusat disebut Desentralisasi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 bahwa urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di antara urusan pilihan itu adalah sebagai berikut:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dari urusan pilihan yang di limpahkan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota urusan pariwisata adalah urusan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Termasuk dalam kewenangan mengelola pariwisata yang sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 18 bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada implementasinya pemerintah daerah memiliki tiga peran yaitu peran pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Peran pembangunan menurut Ndraha (2003:75),” jika diperhatikan dalam-dalam, pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri”.

Pemberdayaan memiliki arti sebagai *empowering* dan *enabling*. Pemberdayaan dalam arti *empowering* menurut Ndraha (2003:75) adalah “pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya (bersifat politik)”. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pemberdayaan apabila rakyat merasa tertindas, tidak berdaya dalam menentukan masa depannya. Pemberdayaan harus terus-menerus komprehensif dan simultan sampai bisa mencapai keseimbangan yang dinamis antara pemerintah

dengan yang diperintah. Kemudian pemberdayaan dalam arti *enabling* yaitu “ proses belajar untuk meningkatkan *abilty, capacity, capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional (Ndraha, 2003:76). Dari pengertian tersebut, pemberdayaan dalam arti *enabling* merupakan proses belajar untuk meningkatkan kecakapan, kapasitas atau isi dan pembawaan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti *enabling* ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran pelayanan. Artinya, “pemerintah sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan, layanan *civil* dan layanan birokrasi”(Ndraha, 2003:76). Pemberian layanan ini meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat melalui program pembangunan. Kebban (2008:16) menyatakan bahwa pemberian layanan oleh pemerintah harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, kemitraan sektor publik dan swasta. Ketiga peran ini dibutuhkan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Termasuk urusan pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata.

Kegiatan pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama diantaranya melibatkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama yang saling mendukung dan tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah Kabupaten/Kota disamping mempunyai sejumlah kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, memfasilitasi dan melakukan promosi dan produk pariwisata yang ada diwilayahnya, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya serta memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, juga mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya pengembangan pariwisata harus dapat melibatkan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kepariwisataan. Tanpa dukungan itu, pariwisata yang potensial menciptakan ketergantungan baru pada pihak eksternal dan akhirnya tidak memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh *stakeholder* untuk memudahkan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata adalah harus didukung oleh partisipasi masyarakat lokal, baik yang bersifat gagasan atau finansial, agar pengembangan pariwisata dapat berfungsi sebagai impuls bagi perbaikan taraf hidup masyarakat (Damanik, 2013: 08).

2.5 Kepariwisataan

2.5.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata menurut Yoeti (1996:21) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan tujuan bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut. Sementara Marpaung (2002:13) mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang ditujukan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beraneka ragam.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 telah menjelaskan definisi dasar kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- e. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

2.5.2 Kawasan Wisata

Berdasarkan UU No.9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Menurut Inskeep (1991: 77) kawasan wisata sebagai area yang dikembangkan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan lengkap (untuk rekreasi/relaksasi, pendalaman suatu pengalaman/ kesehatan). Dari pengertian tersebut dapat diartikan kawasan wisata adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.

Menurut Oka A.Yoeti (1996:165) bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata tergantung pada aspek 3A yaitu *attraction* (atraksi) ,*accessibility* (mudah dicapai) , *aminities* (fasilitas).

1. *Attraction*, yakni segala sesuatu baik itu berupa daya tarik wisata alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Hal ini antara lain meliputi daya tarik keindahan alam, pantai, gunung, atraksi wisata budaya, kebiasaan dan cara hidup masyarakat, keunikan alam, budaya, atraksi-atraksi seni, pertemuan ilmiah, dagang dan sebagainya.

2. *Accessibility* atau aksesibilitas, artinya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata yang dimaksud melalui berbagai media transportasi. Hal ini sangat mempengaruhi keputusan calon wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata.
3. *Aminities*, adalah berbagai fasilitas yang memberikan fasilitas kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan selama mereka melakukan perjalanan wisata di suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata antara lain akomodasi hotel, restoran, layanan informasi, sikap masyarakat, keamanan dan lain-lain.

2.5.3 Obyek dan Daya tarik Wisata

Obyek wisata adalah tempat atau kedudukan yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan (Departemen Pariwisata, Pos, Telekomunikasi 1995:3). Sedangkan menurut Yoeti (1985:185) obyek wisata (*tourist attraction*) adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

Dalam hal ini obyek wisata merupakan salah satu bagian dari berbagai macam yang termasuk produk wisata, dimana obyek wisata merupakan hal yang utama dari sebuah daerah tujuan wisata, karena obyek pada umumnya memiliki daya jual tersendiri, dimana masing-masing obyek wisata memiliki kekuatan-kekuatan karakter atau daya tarik tersendiri yang mampu menarik wisatawan. Hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata, diantaranya adalah

1. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta (*Natural Amenties*), yang termasuk didalamnya: iklim, pemandangan, flora dan fauna;

2. Hasil ciptaan manusia (*man made supply*), termasuk dalam kelompok ini adalah: benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (*historical, cultural, and religious*).

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5).

2.5.4 Sarana dan prasarana kepariwisataan

A. Sarana kepariwisataan

Adapun yang dimaksud sarana kepariwisataan (*Tourism Superstructures*) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan (Yoeti, 1982:184). Sarana kepariwisataan terbagi atas tiga bagian penting yaitu: sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan.

a. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructures*)

Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah: Travel agent dan tour operator, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, Hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar, restoran, serta rumah makan lainnya, obyek Wisata dan atraksi Wisata.

b. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructures*)

Merupakan tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.

c. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Superstructures*)

Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya.

B. Prasarana kepariwisataan

Menurut Yoeti (1996:189) yang dimaksud dengan prasarana (*infrastructures*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lothar A. Kreck dalam Yoeti (1996:186), membagi prasarana kepariwisataan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu

a. Prasarana Perekonomian (*Economic Infrastructures*), yang dapat dibagi atas:

1. Transportasi
2. Prasarana Komunikasi
3. Kelompok yang termasuk "*utilities*" Yang termasuk kelompok ini adalah: penerangan, listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi.
4. Sistem Perbankan

b. Prasarana Sosial (*Social Infrastructures*) Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk kedalam kelompok ini adalah:

1. Pendidikan (*school system*)
2. Pelayanan Kesehatan (*Health Services Facilities*)
3. Faktor Keamanan (*Safety*)
4. Petugas yang langsung melayani wisatawan (*Goverman Apparatus*)

2.4.5 Pengelolaan Pariwisata

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik menurut Bambang Sunaryo (2013:77) pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.

Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan kepemilikan lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas

penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cendera mata, transportasi wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut, keterkaitan antar pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

4. Mengakomodasi aspirasi masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya dapat dilakukan mulai tahap perencanaan, manajemen sampai dengan pemasaran.

5. Daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

6. Pelatihan pada masyarakat terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *profesional*. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-

topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut, serta topik-topik lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang baik.

7. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap* (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung wisatawan.

2.5.6 Pengembangan Pariwisata

Menurut Suwanto (1997: 88-89) pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna dan berguna. Pengembangan pariwisata menurut Nuryanti (2004: 45) adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching* dan *adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan. Selain itu Suwanto (1997:74) menyebutkan beberapa bentuk produk pariwisata alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu: Pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agrotourism*), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomi (*culinary tourism*), pariwisata spiritual (*spiritual tourism*) dan lainnya.

Menurut Yoeti (2008:33-34), ada alasan utama pengembangan pariwisata, yaitu:

1. Alasan ekonomis. Pengembangan pariwisata akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi penduduk setempat. Secara langsung dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah itu maka tenaga kerja akan banyak disedot oleh berbagai macam proyek pembangunan. Selain

itu secara tidak langsung, akan timbul permintaan baru akan hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan kecil serta pendidikan untuk melayani wisatawan yang datang.

2. Alasan non-ekonomis. Wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan adat istiadat serta kebiasaan penduduk setempat. Hal ini akan menyebabkan timbulnya hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata tersebut.
3. Untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan itu dibangun.

2.5.7 Pemangku Kepentingan Pariwisata

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat yang terkait. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus mengacu pada pemahaman bahwa bukan apa yang dilakukan pemerintah saja yang baik akan tetapi keseluruhan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan yang terkait terutama pada pariwisata dan kepentingan publik harus juga mempunyai kapasitas yang memadai.

Seperti yang dikemukakan Mahathir dan Ishihara(1995) dalam Bambang Sunaryo (2013:82) bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga pemangku kepentingan (*good governance*) sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah harus mempunyai kemampuan mewartakan proses politik atau pengambilan keputusan mengenai norma dan kebijakan yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi dalam birokrasi pemerintahan.

2. Pihak swasta/Indusri harus mempunyai kemampuan untuk selalu meningkatkan persediaan modal, membuka kegiatan baru, dan menawarkan kesempatan berusaha baru untuk masyarakat luas.
3. Pihak masyarakat maadani (*civil society*) harus mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, mengartikulasikan permasalahan dan kepentingan masyarakat luas, dan mampu melakukan pengawasan terhadap kedua mitranya.

Mendasar pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, paling tidak terdapat 3 (tiga) pelaku pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataaan, yaitu:

1. Pihak Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
2. Pihak swasta/ Industri baik yang merupakan investor asing dan ataupun pelaku industri dalam negeri
3. Pihak masyarakat yang terkait, baik sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataaan maupun sebagai tuan rumah.

Secara lebih rinci, peran dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (Swasta dan Masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

2. Swasta/ Industri Pariwisata

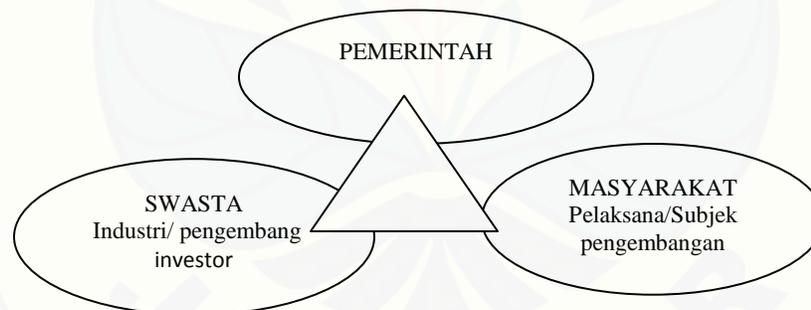
Pembangunan kepariwisataaan yang diselenggarakan mulai dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Daerah tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataaan yang berperan di *private sector*. *Private Sector* utamanya memandang bahwa pembangunan kepariwisataaan adalah kesempatan

untuk mendapatkan nilai tambah dan memperoleh keuntungan melalui pengadaan barang dan penyedia jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan atau pasar wisata.

3. Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan.

Hubungan antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan komponen penting dalam tata kelola pariwisata terutama dalam pengembangan pariwisata. Hubungan yang sinergis dari segenap komponen pelaku inilah yang akan menjadi salah satu faktor penentu daya dukung dan keberhasilan kinerja penyelenggaraan kepariwisataan. Berikut ilustrasi interaksi yang setara antara ketiga aktor pada tata kelola pengembangan kepariwisataan yang baik berikut ini.



Gambar 2.1 Ilustrasi Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

Sumber: Bambang Sunaryo (2013:217)

Dari gambar 2.1 dapat disimpulkan bahwa ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta serta masyarakat harus berjalan setara dan seimbang. Termasuk dalam hal ini bagaimana upaya untuk meningkatkan power masyarakat yang mengalami “*powerless*” dan “selalu dipinggirkan” dalam konteks pembangunan pariwisata.

Dalam konstalasi tata kelola kepariwisataan yang baik seperti dipahami diatas, posisi masyarakat dalam berbagai kesempatan masih berada dalam posisi yang tidak

seimbang terutama manakala disandingkan kedua *stakeholder* lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi masyarakat masih dalam keadaan rentan untuk terpinggirkan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut banyak disebabkan oleh tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2.6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Adimihardja (1999) dalam Bambang Sunaryo (2013:215) adalah suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Sejalan dengan itu, menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 28) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya. Sementara itu, menurut Tjokrowinoto dan Pranarka (1996) dalam Bambang Sunaryo, proses pemberdayaan dalam suatu sektor pembangunan seharusnya diarahkan tidak hanya menasar pada sasaran individu (secara individual) saja, akan tetapi juga harus diarahkan secara kolektif dan kesemuanya harus menjadi bagian aktualisasi dan eksistensi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktur dan substansial dari proses pembangunan sektor tersebut.

Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) ataua *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), yaitu yang biasanya mereka yang tergolong kedalam masyarakat marjinal. *Power* dalam artian *empowering* seperti tadi diartikan

sebagai kekuasaan atau kekuatan, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan terkandung dua makna yaitu suatu proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan dan kekuatan dari *powerful* kepada *powerless*. Pada sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memotivasi individu atau masyarakat yang sedang tidak berdaya agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan tersebut digaris bawahi oleh banyak pakar kepariwisataan seperti Murphuy (1988), Larry Dwyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) yang rata-rata memandang bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan “ kegiatan yang berbasis komunitas” dengan keutamaan bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu *stakeholder*, masyarakat memiliki fungsi dan peran sebagai tuan rumah sekaligus sebagai subjek pengembangan yang turut aktif dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam pembuatan keputusan dalam pembangunan kepariwisataan. Sebagai subyek pembangunan kepariwisataan, masyarakat menjadi pelaku penting dan harus terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan kepariwisataan. Sementara sebagai penerima manfaat, masyarakat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang signifikan dari pengembangan kegiatan kepariwisataan yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada prinsipnya harus senantiasa diarahkan pada pencapaian empat sasaran utama, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. Peningkatan posisi dan kualitas keterlibatan /partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. Peningkatan nilai manfaat positif pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Dengan mengacu kepada ke-4 sasaran tersebut diatas, maka dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan, sasaran-sasaran tersebut harus bermuara pada tiga aspek atau ranah programatis sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas dan peran masyarakat (terkait dengan upaya meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan dan proses pembangunan pariwisata).
- b. Penguatan akses dan kesempatan berusaha masyarakat (terkait dengan upaya meningkatkan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat dari usaha kepariwisataan).
- c. Penguatan sadar wisata (terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan serta dapat menjadi pelaku usaha, pekerja maupun sebagai wisatawan).

Proses peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata menurut Bambang Sunaryo (2013:223) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan: Keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas.
2. Tahap implementasi: Bentuk keterlibatan masyarakat terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan/

pembangunan , pengelolaan objek atau usaha yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan

3. Tahap monitoring dan evaluasi: bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam tahap monitoring /evaluasi serta memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

2.6.1 Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism Development*)

Dalam khasanah keilmuan kepariwisataan, strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan dikenal dengan istilah *Community Based Tourism Development* (CBT). Menurut Murphy (1999) dalam Bambang Sunaryo (2013:139) CBT merupakan wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. Sedangkan menurut Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Suansri (2003: 21-22) menyampaikan point-point yang merupakan aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
- b. Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan

- perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas;
- c. Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal;
 - d. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi;
 - e. Dimensi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Sementara itu Yaman & Mohd (2004: 584 -587) menggarisbawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu:

1. Adanya dukungan pemerintah

Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.

2. Partisipasi dari stakeholder

CBT dideskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian atau penghidupan masyarakat. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri, jasa dan sebagainya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan *tour operator*, *travel agent* untuk memulai bisnis baru.

3. Pembagian keuntungan yang adil

Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.

4. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan

Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa.

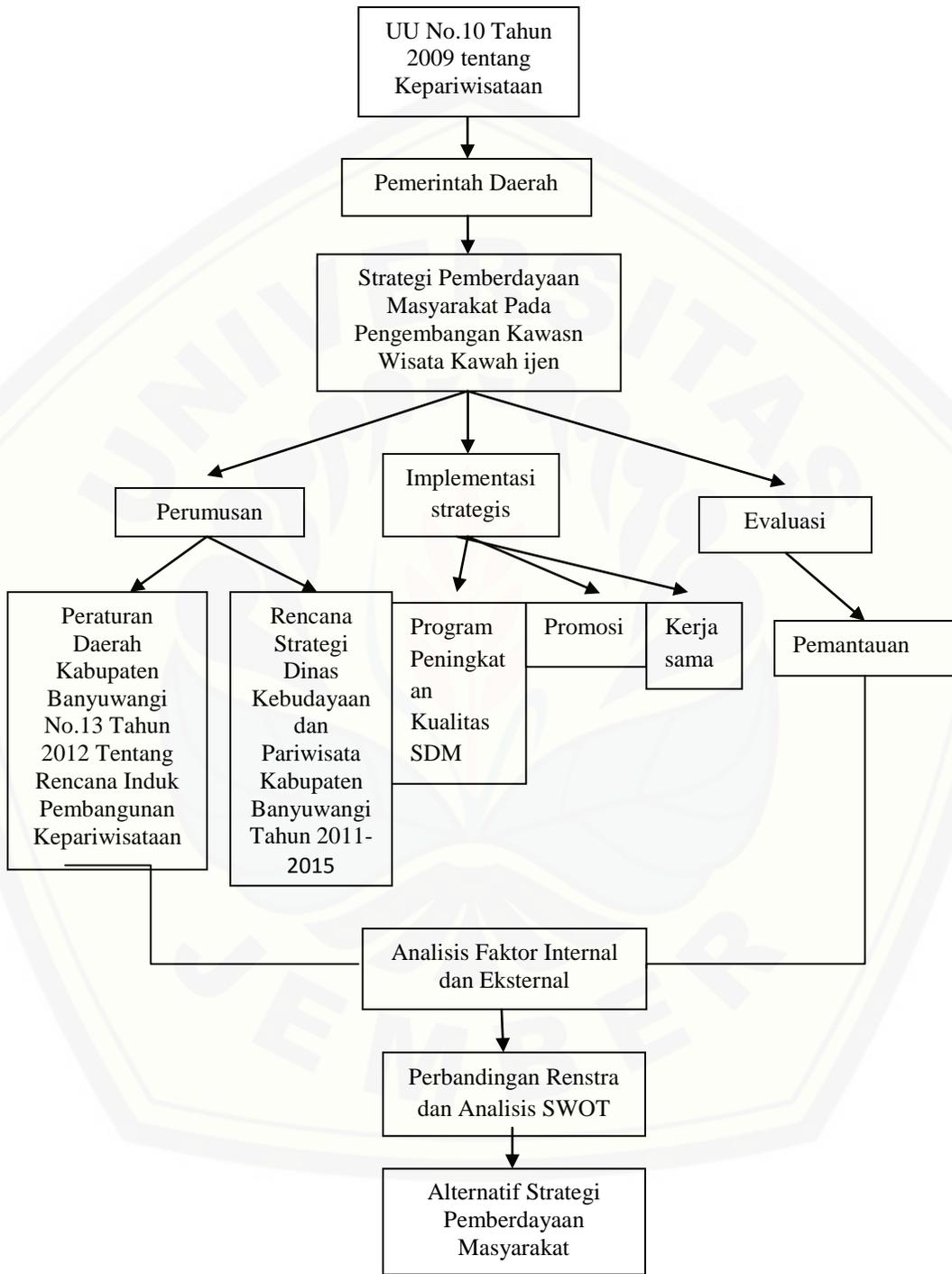
5. Penguatan institusi lokal

Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan ketrampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.

6. Keterkaitan antara level regional dan nasional

Pengembangan CBT menuntut koordinasi dan kerjasama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur stakeholder termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan CBT adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara para pihak stakeholder terkait. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan CBT berperan di semua lini pembangunan baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau, maupun evaluator.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal pokok yang harus ada dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) metode penelitian merupakan aspek yang epistemologis yang penting dan harus dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian – uraian lain yang diperlukan.

Hasil penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitiannya. Sugiyono (2011:2) menyatakan bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkatnya. Berikut teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, diantaranya adalah

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Tempat dan Waktu Penelitian
4. Data dan Sumber data
5. Teknik Pemilihan Informan
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Teknik Menguji Keabsahan Data
8. Teknik Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Tujuan peneliti yakni berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena sosial untuk memperoleh jawaban atas masalah dan disampaikan kepada masyarakat. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong(2007:06) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Usman dan Akbar (2009:130) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir,berperasaan, bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya,direduksi, ditrianggulasi, disimpulkan dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk mengetahui alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata kawah Ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui analisis SWOT.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk dapat menanamkan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai fokus penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata kawah ijen oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan analisis SWOT. Penentuan fokus ini bertujuan agar peneliti dapat terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul penelitian.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan(kurun waktu) penelitian tersebut. Pada penelitian ini, tempat penelitian yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Kantor Desa Taman Sari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi) serta di Balai Konservasi Sumber Daya wilayah V Kabupaten Banyuwangi.

Waktu penelitian dilakukan dengan batas waktu penelitian selama 2 bulan yaitu pada 27 Agustus 2015- 27 Oktober 2015, dimana dalam waktu dua bulan tersebut peneliti akan melakukan wawancara dan menggali informasi data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang pemecahan masalah. Data berperan penting sebagai komponen pokok yang harus terpenuhi untuk menjawab masalah penelitian. Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:23) dinyatakan bahwa data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Lebih lanjut menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong

(2007:57) menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Menurut Arikunto (2010:22) data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama, misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 1997:99). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung bisa dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Menurut Arikunto (2010:22) dikatakan data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan-catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian seperti Rencana Strategi (Renstra) Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi (RIPPDA), data kunjungan wisatawan per obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, profil Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, BUMDes Desa Tamansari.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Penelitian dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dalam bidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut informan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011: 218) menjelaskan bahwa *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Dariharto
- b. Wakil Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Rofik

- c. Staff Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Darmanto
- d. Bagian Perlindungan BKSDA Seksi Konservasi V Banyuwangi yaitu Bapak Adnan
- e. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Dathu
- f. Kepala Desa Desa Tamansari Kecamatan Licin yaitu Bapak Rizal Syahputra
- g. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Tamansari yaitu Bapak Adi Suryat
- h. Masyarakat Desa Tamansari yaitu Bapak Syamsu, Bapak Dandi, Bapak Agus, Bapak Sus, Bapak Atim, Bapak Solohin, Bapak Sukiman, Bapak Toha, Ibu Sri.
- i. Wisatawan Yaitu Mr. Albert dan Mrs. Elisa, Bapak Wijaya, Ibu Meta.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke dalam data kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif (Mantja dalam Imam Gunawan, 2013:142). Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta analisis dengan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan

pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga informan dapat menjawab dengan leluasa pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan selanjutnya (Arikunto, 2010:274). Kemudian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158), dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Pada penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan dalam dokumentasi berupa arsip-arsip lembaga terkait, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, rekaman dan foto serta dokumentasi lainnya yang dapat menunjang penelitian.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsahannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan dapat menggambarkan realita yang ada. Teknik keabsahan data menurut Moleong (2002:178) terdiri dari ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melaalui diskusi dan uraian rinci.

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengutamakan teknik triangulasi melalui diskusi. Tujuannya yakni agar peneliti dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat benar-benar dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong (2002:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin (dalam Moleong, 2002:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Lebih spesifik peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Imam Gunawan, 2013:209). Sementara menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2007:248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:24), teknik analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strenghts*) dan Kelemahan (*weakness*) (Rangkuti, 2006: 18-19).

Alat yang digunakan untuk menentukan alternatif strategi pengembangan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik analisis SWOT menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi.

Tabel 3.1 Matrix SWOT

	IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS		Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
	OPPORTUNITIES(O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
	Tentukan Faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan-kelemahan untuk memanfaatkan
	THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
	Tentukan Faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan-kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Freddy Rangkuti (2006 :31)

Berikut penjelasan mengenai strategi SO,ST,WO,WT:

a. Strategi SO merupakan strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Apabila di dalam kajian terlihat peluang- peluang yang tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif. Dua elemen sektor pariwisata eksternal dan internal yang baik ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian dalam proses pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya

berbagai kendala dan ancaman perubahan, kondisi lingkungan yang terdapat di sekitarnya untuk digunakan sebagai usaha untuk keunggulan komparatif tersebut.

b. Strategi ST merupakan strategi ST merupakan strategi dalam menggunakan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman. Strategi ini mempertemukan interaksi antara ancaman atau tantangan dari luar yang diidentifikasi untuk memperlunak ancaman atau tantangan tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya menjadi peluang bagi pengembangan selanjutnya. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO merupakan strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian dari ebrbagai peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar disini akan dihadapi oleh kurangnya kemampuan sektor untuk menangkapnya. Pertumbuhan harus dilakukan secara hati-hati untuk memilih dan menerima peluang tersebut. Khususnya dikaitkan dengan keterbatasan potensi kawasan, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT merupakan tempat menggali berbagai kelemahan yang kan dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat di dalam kawasan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan sedikit.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan yaitu

1. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat dilakukan pengembangan kawasan wisata yang berbasis masyarakat di Desa Tamansari. Dalam upaya pengembangannya, Desa Tamansari telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan terhadap peningkatan ekonomi lokal, melalui usaha pariwisata yang dikelola masyarakat, produk wisata yang berorientasi pada alam pedesaan yang ditawarkan kepada wisatawan.
2. Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dijalankan melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2015 masih belum mampu memberi kemajuan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari. Karena sosialisasi program wisata yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangkap peluang wisata.
3. Dari hasil analisis faktor internal dan eksternal yang dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT, maka diperoleh strategi SO,WO,ST,WT sebagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari yaitu sebagai berikut.
 - a. Strategi SO yaitu Memanfaatkan peraturan daerah untuk mengelola dan mengembangkan kawasan wisata di Desa Tamansari, Mengembangkan kegiatan masyarakat dengan keterampilan membuat dan kuliner, Menjadikan paket agrowisata dan Bekerjasama dengan Jasa *Travel* yang dikelola Masyarakat Lokal, Melestarikan Budaya Banyuwangi Melalui Pagelaran Tari Gandrung, Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten dengan pariwisata seperti LSM maupun Perguruan Tinggi.

- b. Strategi WO yaitu Mendorong dan mendampingi tumbuh-kembangnya industri kreatif dan pemasaran hasil industri kreatif di Desa Tamansari dengan meningkatkan UMKM masyarakat, Menjalani kerjasama dengan masyarakat lokal untuk promosi usaha wisata yang dikelola masyarakat, Meningkatkan pemanfaatan produk lokal yaitu dengan Peningkatan nilai jual kopi yang dikembangkan dengan fermentasi hewan luwak, *Training skill* untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat, Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian
 - c. Strategi ST yaitu Membuat *event-event* pariwisata, Memperkuat nilai-nilai budaya dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan adat, Pengembangan desa-desa potensial lain di Kecamatan Licin, Pengembangan desa-desa potensial lain di Kecamatan Licin.
 - d. Strategi WT yaitu Meningkatkan kualitas masyarakat lokal agar dapat memberikan pelayanan prima, Melibatkan lembaga adat serta tokoh masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangan, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pariwisata yang berkelanjutan dan nilai-nilai budaya sebagai aset penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
4. Berdasarkan hasil perbandingan dengan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 dihasilkan alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen yaitu Mengenalkan masyarakat dengan keterampilan membatik dan kuliner, Menjadikan paket agrowisata dan Bekersama dengan Jasa *Travel* yang dikelola Masyarakat Lokal, Melestarikan Budaya Banyuwangi Melalui Pagelaran Tari Gandrung, Mendorong dan mendampingi tumbuh-kembangnya industri kreatif dan pemasaran hasil industri kreatif di Desa Tamansari dengan meningkatkan UMKM masyarakat, Meningkatkan pemanfaatan produk lokal yaitu dengan Peningkatan nilai jual kopi yang dikembangkan dengan fermentasi hewan luwak.

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas, maka saran-saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

6. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membuat *brand image* Desa Tamansari sebagai desa wisata Api Biru. *Brand image* perlu di buat untuk mengenalkan potensi dan ciri khas dari desa tersebut sehingga masyarakat secara tidak langsung juga akan terlibat mengikuti proses pengembangan dan masyarakat dapat diberdayakan.
7. Mengupayakan pengembangan di Desa Tamansari sebagai kawasan agrowisata. Sehubungan dengan adanya potensi alam yang menarik sangat potensial jika dikembangkan sebagai agrowisata. Dalam kegiatan ini pemerintah harus melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai pelaku wisata, sehingga masyarakat bisa lebih diberdayakan dan keuntungan bisa secara langsung diterima oleh masyarakat.
8. Perlu adanya dorongan dan pendampingan yang lebih intensif terhadap tumbuh-kembangnya industri kreatif masyarakat dengan meningkatkan UMKM. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata agar menghasilkan produk wisata yang berinovatif dan berkualitas.
9. Sosialisasi tentang kepariwisataan yang merata untuk memberikan pemahaman mengenai pariwisata, desa wisata dan pariwisata berbasis masyarakat kepada seluruh masyarakat di Desa Tamansari oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan perlu mengundang Praktisi Wisata seperti LSM atau Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah, Cantika Sri Budi.2002. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineke Cipta
- Bungin,Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bryson,John M. .2004. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Jakarta:Pustaka Pelajar
- Damanik, Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan,Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori& Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hadinoto Kusudianto. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press.
- Hunger, J David dan Thomas L Wheelen.2001.*Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Ofset
- Idrus,Muhammad.2009. *Metodologi Peneltian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- J, Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia Widayasarana Indonesia.
- Kuncoro,Mudrajad.2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung,Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto Totok dan Soebianto Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Milles, Mathew B danHubermanAMichael.2007. *Analisis Data Kualitatif*.Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Moleong Lexy J.2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muljadi. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musanef. 1995. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Gunung Harta.
- Ndaraha, Talizuduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Pendit, Nyoman S. 1997. *IlmuPariwisatadanPengantarPerdana*. Jakarta: PT.PradnyaPramita, edisirevisi.
- Raharjo. 2007. *Metode Penelitian Kombinasi*. Yogyakarta: CV Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, Stephen P.2001. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta:Erlangga.
- Soekadijo.R.G. 2000. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage")*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto,Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Spillane,J.J. 1987.*Pariwisata Indonesia SejarahdanProspeknya*.Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwantoro Gamal.1997. *Dasar-dasar Pariwisata*.Yogyakarta: Andi
- Thoha Miftah.2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Jakarta: Kencana
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiyadi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT Pranadya Paramita

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI

Yoeti, Oka. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

Yoeti, Oka. 1985. *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. Jakarta: PT. Prandya Paramita.

Yoeti, Oka. 1996. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Aksara

Yoeti, Oka. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Bandung: Angkasa

Yoeti, Oka. 2008. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradaya Pratama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi

Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Internet

www.banyuwangikab.go.id

<http://litbangekua.files.wordpress.com> Diakses pada tanggal 20 April 2015 pukul 09.29 WIB

tribunnews.com/2013/09/16/partisipasi-masyarakat-kunci-pengembangan-pariwisata. Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 19.16 WIB

Banyuwangikab.go.id

www.academia.edu/9208750/Bab_I Diakses pada tanggal 04 April 2015 pukul 15.39 WIB

beritajatim.com/ekonomi/207486/jumlah_turis_asing_ke_banyuwangi_meningkat_nyaris_100_persen.html#.Wx7fllwsk. Diakses pada tanggal 04 april 2015 pukul 15.32 WIB

<http://rubik.okezone.com/read/22538/banyuwangi-raih-penghargaan-dunia-dari-badan-pariwisata-pbb>. diakses pada tanggal 18 maret 2016 puku 07.36 WIB



LAMPIRAN 1

Strategi dan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Permasalahan	Strategi	Program
<p>Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik untuk pariwisata yang belum maksimal akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan</p>	<p>Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di lingkungan destinasi 2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata 3. Melakukan koordinasi dengan pendukung pariwisata
<p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata, Kemampuan bahasa dan keterampilan masyarakat yang belum maksimal, Belum optimalnya peran para pelaku usaha pariwisata serta belum maksimalnya SDM dalam rangka pengembangan usaha pariwisata yang dapat mengakibatkan tergesernya peran masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata.</p>	<p>Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan pelaku-pelaku wisata 2. Pengembangan keterampilan sumber daya manusia lokal 3. Peningkatan kualitas pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata 4. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai tradisi sebagai akar budaya lokal

Masih terbatasnya tingkat pemasaran, Pengembangan kawasan pendukung wisata yang belum maksimal serta Belum optimalnya kunjungan wisatawan	Menciptakan <i>Brand</i> – <i>Image</i> positif bagi pariwisata	1. Peningkatan Promosi wisata melalui media tulis, elektronik, langsung maupun event. 2. Menciptakan paket – paket wisata dengan bekerjasama dengan masyarakat lokal guna mengembangkan usaha wisata.
---	---	--

sumber: data diolah dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan A. Yani 78 Phone : (0333) 424172 Fax. (0333) 412851
www.banyuwangitourism.com - www.pariwisata.banyuwangikab.go.id
email : pemasaran@banyuwangitourism.com
BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415

SURAT- KETERANGAN

Nomor : 556/ 2011 /429.112/2015

Yang bertandatangan dibawah ini Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Program Study Administrasi Negara Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Jember yang bernama :

IRA PUSPITA SANDY NIM : 110910201037

Telah melakukan Penelitian sebagai Syarat Penyusunan Skripsi dengan Judul “ Strategi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam Mengoptimalkan Peran Masyarakat pada Pengembangan Obyek Wisata Kawah Ijen di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus s/d 27 Oktober 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 Desember 2015

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI



BANUARY BRAMUDITA, S.Sos, MBA, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19730126 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN
KANTOR KEPALA DESA TAMANSARI
Jl.Raya Lidjen Desa Tamansari Kecamatan Licin Banyuwangi 68454

SURAT KETERANGAN

Nomor : 556/3572/429.422.08/2015

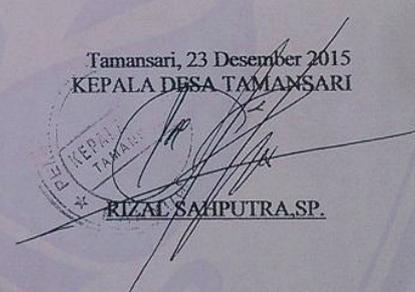
Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Program Study Administrasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Jember yang bernama :

IRA PUSPITA SANDY NIM : 110910201037

Telah melakukan Penelitian Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi dengan Judul “ Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan peran masyarakat pada pengembangan Obyek Wisata Kawah Ijen di Dnas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus s/d 27 Oktober 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamansari, 23 Desember 2015
KEPALA DESA TAMANSARI


RIZAL SAMPUTRA, SP.



Nomor : 1376/UN25.3.1/LT/2015

27 Agustus 2015

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2667/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 21 Agustus 2015, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Ira Puspita Sandy/100910201037
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Jawa IIB No. 16 Jember/Hp. 082331488989
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengoptimalkan Peran Masyarakat Pada Pengembangan Obyek Wisata Kawah Ijen
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
2. Dinas Pendapatan Kab. Banyuwangi
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
4. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kab. Banyuwangi
5. Kantor Desa Tamansari Kecamatan Licin Kab. Banyuwangi
Lama Penelitian : Dua bulan (27 Agustus 2015 – 27 Oktober 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 01 September 2015

Nomor : 072/1249 /REKOM/429.204/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada .
Yth. 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Kepala Dinas Pendapatan
4. Kepala BKSDA
5. Camat Licin
6. Kades Tamansari - Licin
di -

BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember
Tanggal : 27 Agustus 2015
Nomor : 1376/UN25.1.1/LT/2015

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada
Nama : IRA PUSPITA SANDY
NIM : 100910201037

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam
Mengoptimalkan Peran Masyarakat Pada Pengembangan
Obyek Wisata Kawah Ijen
Tempat : Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Pendapatan, BKSDA, Desa Tamansari Kecamatan Licin
Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 27 Agustus s.d 27 Oktober 2015

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian harap menjadi maklum.

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN

Pembina Tk. I

NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan :

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN

Jalan Lijen Nomer 1 Telp. (0333) 426644

<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : kec. Licin @Banyuwangi go.id

L I C I N

Licin, 14 September 2015.

Nomer : 072/241/429.422/2015.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada ,
Yth.Sdr. Kades Tamansari
di -
L i c i n

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 september 2015 Nomor : 072/1219/REKOM/429.204/2015 sebagaimana perihal pada pokok surat kami memberikan rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : IRA PUSPITA SANDY

N I M : 100910201037

J u d u l : Strategi Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam Mengoptimalkan Peran Masyarakat pada Pengembangan Obyek Wisata Kawah Ijen

Sasaran : BKSDA , Obyek Wisata Kawah Ijen Desa Taman sari Kecamatan Licin

Waktu : 27 Agustus s/d 23 Oktober 2015

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih .

CAMAT LICIN



MUHAMAD LUTFI, S.Sos. M.si.

embina

Nip. 19670306 198809 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

1. Apa tujuan dari pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah terdapat pariwisata yang menjadi prioritas pengembangan?
3. Siapa yang berwenang mengelola Kawah Ijen?
4. Bagaimana konteks peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?
5. Dalam pengembangan kawasan wisata kawah Ijen, manakah lokasi yang menjadi prioritas pengembangan?
6. Bagaimana proses dalam pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
7. Hambatan apa yang terjadi selama proses pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari?
8. Apa yang sudah dilakukan dinas pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat pada pengembangan wisata kawah Ijen?
9. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
10. Apakah terdapat strategi dalam pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
11. Bagaimana strategi dalam memberdayakan masyarakat pada pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?

B. Wawancara Kepada Bappeda

1. Dalam pengembangan wisata kawah ijen, apakah peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?
2. Adakah kebijakan yang mengatur tentang pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?

3. Apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan kawasan wisata Kawah Ijen?

C. Wawancara Kepada BKSDA

1. Apa tugas dan kewenangan BKSDA di kawah Ijen?
2. Apakah BKSDA juga ikut berperan dalam pengembangan kawasan wisata kawah ijen?
3. Apakah yang sudah dilakukan BKSDA di masyarakat sekitar kawah Ijen?
4. Apakah BKSDA melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi?

D. Wawancara Kepada Kepala Desa Tamansari

1. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
2. Apakah yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Apa yang sudah digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
4. Apakah masyarakat mendukung dengan pengembangan kawasan Wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari?
5. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat Desa Tamansari?
6. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata kawah Ijen?
7. Menurut anda apakah kegiatan pengembangan wisata Kawah Ijen di Desa Tamansari memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal ?
8. Apakah program dari Pemerintah sudah dapat memberdayakan masyarakat desa Tamansari?

E. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Tamansari

1. Menurut anda, apakah pariwisata itu penting?

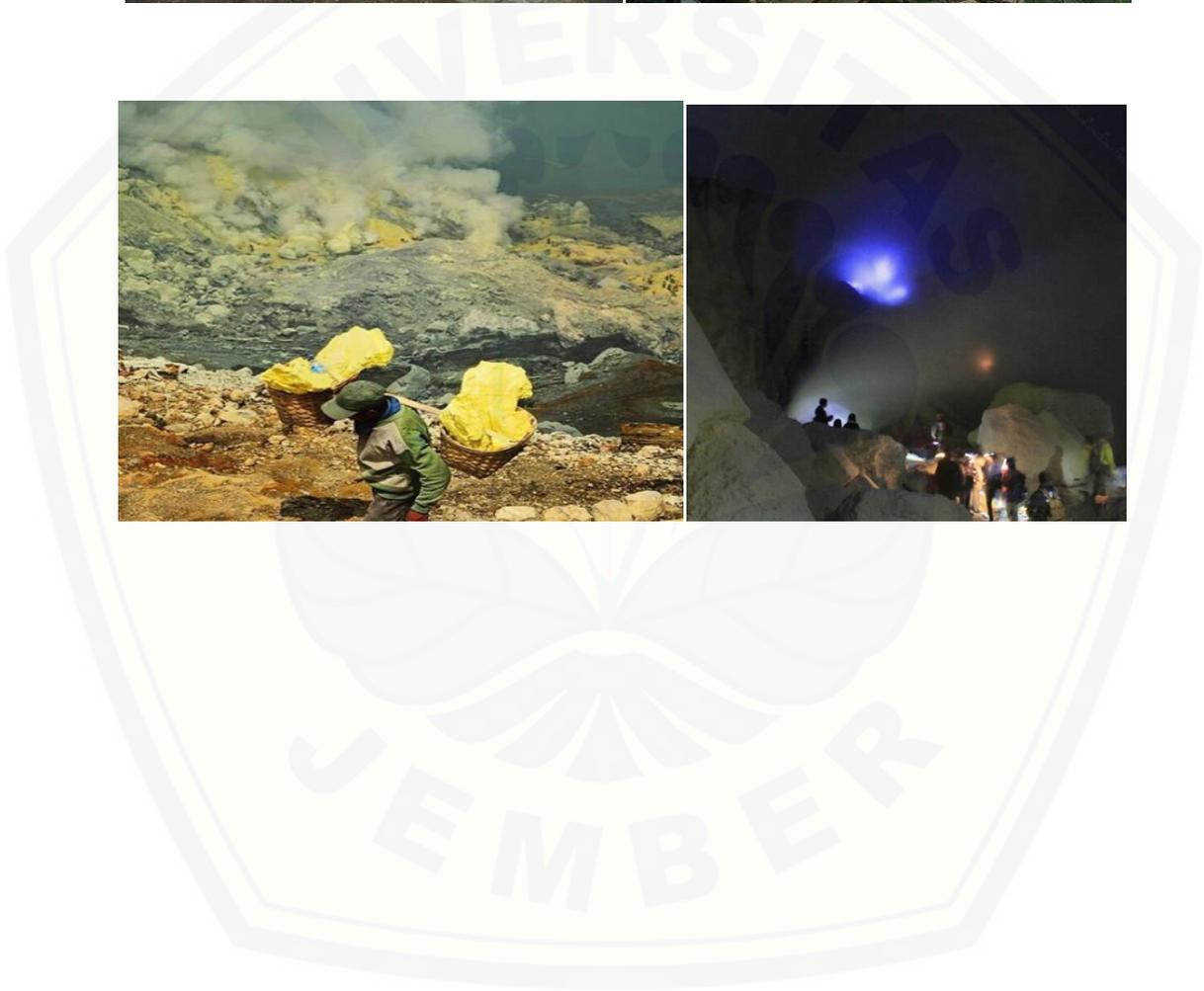
2. Apakah Bapak/Ibu mendukung pengembangan kawasan wisata di desa Tamansari?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program-program yang diadakan oleh Dinas pariwisata?
4. Menurut anda, apakah perlu keterlibatan masyarakat untuk pariwisata ke depan ?
5. Apa harapan anda untuk pengembangan pariwisata di Desa Tamansari?

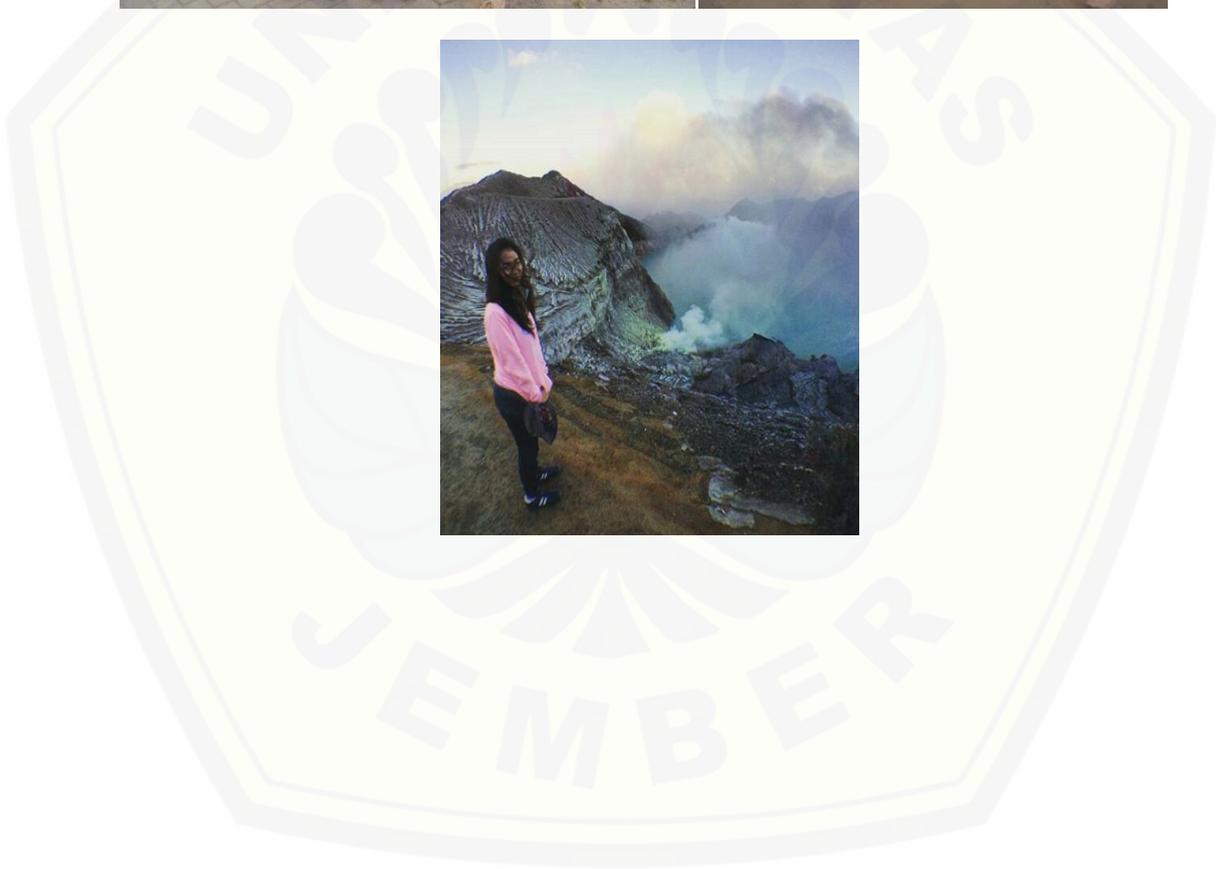
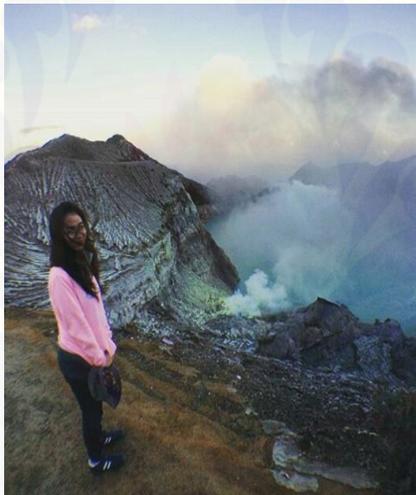
F. Wawancara Kepada Wisatawan di Kawah Ijen

1. Bagaimana pendapat anda tentang kawah Ijen?
2. Bagaimana menurut pendapat anda tentang daya tarik wisata Kawah Ijen?
3. Sepanjang kawasan wisata kawah Ijen untuk menuju ke kawah Ijen kita temui perkebunan, Bagaimana menurut anda apakah hal itu merupakan salah satu daya tarik wisata ?

DOKUMENTASI







**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS GAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 2010 - 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

3.1.1. Permasalahan pembangunan

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Keadaan dan perkembangan pembangunan kebudayaan
- b. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata

3.1.2. Permasalahan urusan bidang - bidang

Perkembangan pembangunan kebudayaan sudah ada pembinaan yang cukup berarti. Hal ini terlihat dengan tingkat pertumbuhan sanggar seni dan budaya serta aktifas pembangunan sarana dan prasarana pada situs budaya yang ada, namun dari segi pendanaan nilai masih relatif sangat kecil termasuk dukungan untuk mengikuti festival even budaya dan pertunjukkan kesenian. Sementara perkembangan pembangunan pariwisata terlihat adanya semangat dan kegairahan yang cukup besar terhadap kegiatan, meskipun kondisinya masih tetap berada

pada tahap inventarisasi, promosi dan pembangunan prasarana dasar, walaupun demikian sektor pariwisata lebih berpeluang untuk menarik wisatawan untuk berkunjung.

➤ **Urusan Kebudayaan :**

a. Permasalahan kekayaan budaya :

1. Masih perlunya sarana dan prasarana berupa pembuatan pondok utk petugas juru pelihara makam situs
2. Perlu perbaikan infrastruktur/jalan dan penambahan rambu-rambu menuju situs makam bersejarah

b. Permasalahan pengembangan dan pelestarian seni gandrung antara lain masih kurangnya minat dan antusias para remaja putri terhadap pelestarian kesenian gandrung, sehingga dikhawatirkan dalam kurun 5 (lima) mendatang tari gandrung akan terancam punah

c. Pemasalahan museum

d. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka.

➤ **Urusan Pariwisata :**

a. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata

b. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata

c. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata

d. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum (RHU), hotel/rumah makan melaporkan kunjungan wisata

e. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan

f. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa

g. Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata obyek desa tempat wisata (ODTW).

➤ **Prioritas pembangunan**

Dengan demikian agenda prioritas pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera

2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia
3. Meningkatkan sarana dan prasarana ODTW yang tersusun dalam program pembangunan daerah.
4. Meningkatkan hubungan dan kemitraan dengan investor
5. Meningkatkan kemitraan dgn masyarakat lokal guna mengembangkan usaha wisata.
6. Mempromosikan potensi-potensi yg ada di Kabupaten Banyuwangi melalui media cetak, media elektronika
7. Meningkatkan website tentang gambaran Kabupaten Banyuwangi dan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yg ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat di lihat di mancanegara maupun domestik.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kab. Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010 - 2015.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dantelahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi antarlainsebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder
 - b. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
 - c. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
2. Bidang Pemasaran
 - a. Peningkatan promosi melalui berbagai media

- b. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata yang telah maju
 - c. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kab. Banyuwangi dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah
3. Bidang Kebudayaan

- a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah
- b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
- c. Meningkatkan seni dan budaya Banyuwangi ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah.

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kab Banyuwangi, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektorkepariwisataan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagiandari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minatwisatawan yang masuk ke Kab Banyuwangi.
3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Pusat, termasuk promosi wisata melalui pameran didalam maupun luar negeri.
4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektorkebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kab Banyuwangi.
5. Akselerasi pembangunan Kab. Banyuwangi sebagai kawasanagrowisata seni dan budaya.
6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasukpewarisan kepada generasi muda.
7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kab Banyuwangi.
8. Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yangrepresentatif milik Pemerintah Kab Banyuwangi melalui rehabilitasi gedungPadepokan Seni.

4.5.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang digunakan adalah akselerasi program yaitu dengan menggerakkan potensi dan penunjang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Banyuwangi mempunyai daya tarik

Kebijaksanaan dan strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian Misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan

Misi sebagai berikut :

1. **Koordinasi**; adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. **(Friendly system)**; adalah system yang menyenangkan wisatawan;
3. **(Improve)**; adalah upaya untuk memperbaiki tingkat pelayanan kepada wisatawan secara continue;
4. **(Exceed Expectations)**; adalah upaya yang dilakukan untuk melampaui/ memenuhi yang diharapkan wisatawan untuk menguasai pasar dengan menetapkan standar pelayanan yang tinggi dan mengkomunikasikan standarisasi tersebut kepada staf;
5. **Motivasi**; adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus-menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
6. **Eligible**; mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu memuaskan pelanggan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan;
7. **Coorporate culture**; penciptaan kultur organisasi yang didedikasikan untuk pelayanan prima. Penekanannya adalah bagaimana membangun nama baik dimata wisatawan, penciptaan citra organisasi (*brand image*) melalui pelayanan yang memberikan kepuasan wisatawan.

sebagai daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan momentum :

1. Penetapan Kata Kunci kepariwisataan kepariwisataan “ *BANYUWANGI THE SUNRISE OF JAVA* “, karena matahari terbit paling awal di BANYUWANGI.
2. Penetapan Gandrung sebagai Maskot Pariwisata Banyuwangi sesuai SK Bupati Banyuwangi nomor. 173 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002
3. Pembangunan Segi Tiga Berlian sebagai ikon pariwisata alam Banyuwangi
4. Mewujudkan Banyuwangi sebagai “*City of Art*“ dengan keragaman budaya yang dimiliki, akar udaya lokal yang kuat dan interaksi budaya antar etnis yang ada serta letak geografis yang terletak di persimpangan.
5. Mendorong terlaksananya investasi di Bidang Pariwisata dengan memberlakukan program isentif

➤ **KEBIJAKAN :**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang diambil adalah

1. Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder
 - b. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
 - c. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
2. Bidang Pemasaran
 - d. Peningkatan promosi melalui berbagai media
 - e. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisata yang telah maju
 - f. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kab.Banyuwangi dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah

3. Bidang Kebudayaan

- a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah
- b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
- c. Meningkatkan seni dan budaya Banyuwangi ke berbagai even di dalam maupun di luar daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN dan PAGU INDIKATIF

5.1.Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk SKPD

A. Urusan Kebudayaan

Kebijakan umum pembangunan urusan Kebudayaan dan Pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010- 2015 diarahkan pada pengembangan budaya daerah dan nilai - nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah dengan sasaran :

1. Berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan.
2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan seni dan budaya.
3. Meningkatnya kesempatan untuk pengembangan ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi budaya sekaligus mengembangkan dan melindungi potensi tersebut.

B. Urusan Pemasaran

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata
2. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar negeri

C. Urusan Pariwisata

Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010- 2015, kebijakan umum pembangunan urusan pariwisata diarahkan pada pengembangan potensi obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan:

- a. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata
- b. Peningkatan pelayanan baik pada bidang obyek dan daya tarik wisata
- c. Peningkatan kualitas pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata
- d. Peningkatan sistim informasi pariwisata dan kebudayaan melalui promosi yang efektif dan efisien serta terpadu.

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata
3. Meningkatnya fungsi kelembagaan pariwisata
4. Meningkatnya kerjasama dan investasi.

5.2. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan strategik. Tanpa indikator kinerja yang jelas, maka rencana strategik tidak dapat diimplementasikan secara baik karena tidak ada alat ukur yang jelas dalam setiap kegiatan yang akan dicapai.

Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber - sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- ❖ Urusan pariwisata program pengembangan pemasaran wisata :
 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
 3. Peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung wisata
 4. Peningkatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
 5. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata
 6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 7. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- ❖ Urusan program pengembangan wawasan budaya lokal :
 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 2. Pelestarian budaya lokal khususnya osing yang berwawasan nusantara
 3. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbudaya dan beragama
 4. Sosialisasi dan pengembangan budaya lokal
 5. Pelestarian dan pengembangan bahasa dan udaya osing
 6. Pengintegrasian budaya lokal dengan pengembangan pariwisata
 7. Penyusunan buku dan penelitian sejarah lokal Banyuwangi



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran Negara Nomor 4725);

7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;

5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPKK adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.

14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;

- i. Demokrasi;
- j. Kesejahteraan,
- k. Kesetaraan; dan
- l. Kesatuan

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensipariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan umum pembangunan pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;

- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan

kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;

- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar

Pasal 11

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan aspek :

- g. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - h. Potensi dasar;
 - i. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - j. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - k. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - l. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - m. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB VII
USAHA PARIWISATA
Pasal 15

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 16

(6) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.

(7) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.